

**KONSTRUKSI SISTEM AHLUL ḤALLI WAL 'AQDI PADA
PEMILIHAN RAIS 'AAM NAHDLATUL ULAMA DALAM
KAJIAN FIQH SIYASAH**

(Studi Kasus Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama Tahun 2015 di Kabupaten Jombang)

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Ilmu Keislaman
pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel



Oleh :

M. Hasan Ubaidillah
NIM : F08312011

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Hasan Ubaidillah

NIM : F08312011

Program : Doktor (S-3)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa Disertasi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri, terkecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Juli 2018

Yang menyatakan



M. Hasan Ubaidillah

PERSETUJUAN

Disertasi yang ditulis oleh M. Hasan Ubaidillah ini telah disetujui

Pada Tanggal 9 Juli 2018

Oleh

Promotor



Prof. DR. H. A. Faishal Haq, M.Ag

Promotor



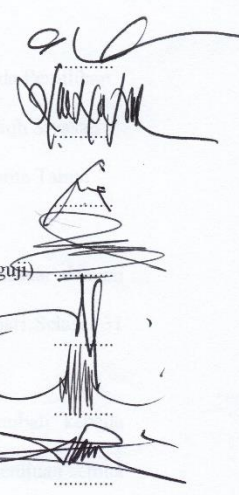
Prof. Akh. Muzakki, Grad.Dip.SEA. M.Ag. M.Phil. Ph.D

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Disertasi yang ditulis oleh M. Hasan Ubaidillah ini telah diuji dalam tahap pertama pada tanggal 31 Juli 2018 dan dianggap layak untuk diuji dalam tahap kedua.

Tim Penguji :

1. Dr. Ahmad Nur Fuad, MA. (Ketua/Penguji)
2. Dr. H. Hamis Syafaq, M.Fil. (Sekretaris/Penguji)
3. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag. (Promotor/Penguji)
4. Prof. Akh. Muzakki, Grap, Dip, SEA, MA, Ph.D. (Promotor/Penguji)
5. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. (Penguji Utama)
6. Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA. (Penguji)
7. Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA (Penguji)



Surabaya, Oktober 2018


Direktur
Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Hasan Ubaidillah
NIM : FO8312011
Fakultas/Jurusan : Dirasah Islamiyah
E-mail address : Ubaidillah_mhasan@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Konstruksi sistem Ahlul Halli Wal A'adi pada Pemeliharaan Raisi Am
Mahdhatul Ulama Dalam Kajian Fiqih Siyasah (Studi Mukhtamar ke 83
Mahdhatul Ulama Tahun 2015 di Kabupaten Jombang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(M. Hasan Ubaidillah)
nama terang dan tanda tangan

Kesesuaian dan keselarasan tersebut dapat ditelisik dari dinamika pemilihan pemimpin sejak berdirinya Nahdlatul Ulama hingga masa sekarang, yaitu senantiasa menempatkan figur ulama sebagai panutan utama yang ditaati. Aktualisasi dan wujud dari ketaatan terhadap para ulama tersebut adalah dengan mengikuti dan mematuhi perintah serta fatwa yang dikemukakan termasuk didalam persoalan memilih pemimpin Nahdlatul Ulama.

Otoritas kepemimpinan ulama dalam Nahdlatul Ulama terhimpun dalam wadah yang disebut sebagai lembaga Syuriah yang dipimpin oleh seorang ulama yang disebut Rais Syuriah. Pemilihan Rais Syuriah dilakukan oleh para ulama dengan mengedepankan prinsip musyawarah mufakat. Hal ini didasarkan atas kesadaran dan pemahaman bersama bahwa posisi Rais Syuriah merupakan derajat tertinggi dalam hirarki dunia kiai atau ulama dalam Nahdlatul Ulama, sehingga hanya para ulama yang telah sampai pada derajat tertinggi yang pantas menduduki posisi tersebut, sebagaimana yang terjadi dalam penentuan jabatan Rais 'Aam yang merupakan pemegang otoritas tertinggi dalam Jamiyah Nahdlatul Ulama tingkat pusat.

Sejak pertama kali didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H pemegang otoritas tertinggi dalam Nahdlatul Ulama diamanatkan kepada KH. M. Hasyim Asy'ari yang disebut sebagai Rais Akbar hingga wafat. Setelah wafatnya KH. Hasyim Asy'ari, otoritas kepemimpinan Nahdlatul Ulama dilanjutkan oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah yang penyebutannya diganti

sebagai Rais 'Aam pada Mukhtamar ke-30 yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri pada tanggal 21 Nopember 1999 dan ditetapkan kembali sebagai Rais 'Aam pada Mukhtamar ke-31 yang dilaksanakan di Asrama Haji Dono Hudan Boyolali Jawa Tengah pada tanggal 28 Nopember sampai tanggal 2 Desember 2004.

Pada Mukhtamar ke-32 yang dilaksanakan di Asrama Haji Sudiang Makasar Sulawesi Selatan pada tanggal 23-28 Januari 2010, KH. Ahmad Muhammad Sahal Mahfudh ditetapkan kembali sebagai Rais 'Aam melalui proses pemilihan yang menghadapkannya dengan KH. Ahmad Hasyim Muzadi. Setelah wafatnya KH. Ahmad Muhammad Sahal Mahfudh pada tahun 2014, posisi jabatan Rais 'Aam dimandatkan kepada KH. A. Musthafa Bisri.

Untuk mengembalikan proses pemilihan dan penetapan Rais 'Aam melalui musyawarah mufakat sebagaimana yang telah dicontohkan sejak generasi para pendiri Nahdlatul Ulama, maka KH. Ahmad Muhammad Sahal Mahfudh selaku Rais 'Am menginstruksikan untuk membentuk tim khusus yang mengkaji secara akademik sistem pemilihan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*.²³ Rumusan akademik yang dihasilkan oleh tim khusus tersebut dibahas dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ke-2 yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 2-3 Nopember 2014.

²³ Instruksi dari KH. Ahmad Muhammad Sahal Mahfudh selaku Rais 'Aam tersebut dikemukakan pada waktu rapat pleno ke-2 PBNU di Wonosobo tanggal 6-8 September 2013. Instruksi tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan tim khusus yang bertugas mengkaji sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang akan digunakan untuk memilih dan menetapkan Rais 'Aam Nahdlatul Ulama. Tim Khusus ini di percayakan kepada KH. Masdar Farid Mas'udi dan Abdul Mun'im DZ.

Keputusan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ke-2 tersebut menetapkan diberlakukannya sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dalam pemilihan kepemimpinan Nahdlatul Ulama secara bertahap. Tahapan tersebut dimulai dari pemilihan dan penetapan Rais 'Aam dan Rais Syuriah disemua tingkatan. Sedangkan untuk pemilihan ketua umum dan ketua Tanfidhiah disemua tingkatan masing menggunakan pilihan langsung.

Hasil keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ke-2 yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 2-3 Nopember 2014 ini ditindak lanjuti pada pelaksanaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ke-3 yang dilaksanakan pada tanggal 14-15 Juni 2015 di Jakarta. Keputusan dari Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar ke-3 tersebut mengesahkan rumusan oprasional sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang dipergunakan untuk memilih dan menetapkan Rais 'Aam dalam Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama.²⁴

Mukhtamar ke-33 yang dilaksanakan pada tanggal 1-5 Agustus 2015 di Kabupaten Jombang Jawa Timur berlangsung secara dinamis, karena untuk pertama kalinya sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dipergunakan untuk memilih dan menetapkan Rais 'Aam. Walaupun sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* pernah diberlakukan pada Mukhtamar ke-27 di Situbondo, akan tetapi tahapan dan

²⁴ Dokumen PBNU yang berjudul “ Amanat KH. Sahal Mahfudh (Rais 'Aam PBNU) tentang *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang disampaikan dalam Pembahasan Komisi Organisasi pada Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama.

prosedur serta implementasinya sangat berbeda dengan pemberlakuan sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama.

Pemberlakuan sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang dipergunakan untuk memilih dan menetapkan Rais 'Aam pada Muktamar ke-33 ini diwarnai oleh penolakan sebagian peserta Muktamar karena dianggap mencederai demokrasi. Sebagian peserta Muktamar yang lain menerima sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* ini, akan tetapi diberlakukan pada Muktamar ke-34 yang akan datang, karena keputusan pemberlakuan sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* ini belum disahkan oleh Muktamar, sehingga belum dapat diberlakukan pada Muktamar ke-33.

Akan tetapi para muktamirin juga banyak yang mendukung agar sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* tersebut diberlakukan pada Muktamar ke-33 karena faktor kebutuhan yang mendesak, terlebih lagi pemberlakuan sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* ini merupakan amanat dari Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar ke-2 dan ke-3 di Jakarta yang telah disosialisasikan kepada Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se- Indonesia.

Perbedaan pandangan tentang pemberlakuan sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* ini dapat terselesaikan setelah KH. Ahmad Musthafa Bisri selaku Rais 'Aam menginstruksikan untuk menggelar rapat khusus Rais Syuriah Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia yang secara khusus membahas pemberlakuan sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*. Melalui proses musyawarah yang diakhiri dengan voting diputuskan bahwa sistem

Ahlul Halli Wal 'Aqdi diberlakukan untuk memilih Rais 'Aam pada Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama.

Akibat dari pemberlakuan sistem *Ahlul Halli Wal Aqdi* dalam memilih Rais Aam pada Mukhtamar ke-33 tersebut, maka muncul ketidakpuasan dari pihak yang mengatasnamakan Forum Lintas Wilayah Nahdlatul Ulama (FLWNU) yang di koordinatori oleh Tarmizi Tohor ketua Tanfidhiyah Pengurus Wilayah Kepulauan Riau. Forum ini menggugat hasil Mukhtamar ke-33 yang dilaksanakan pada tanggal 1-5 Agustus 2015 di Kabupaten Jombang. Gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, walaupun pada akhirnya gugatan yang telah di ajukan dicabut kembali.

Forum Lintas Wilayah Nahdlatul Ulama ini juga menerbitkan buku yang berjudul Buku Putih Tentang Mukhtamar Hitam yang memaparkan tentang berbagai kejanggalan dalam Mukhtamar ke-33 yang dilaksanakan pada tanggal 1-5 Agustus 2015 di Kabupaten Jombang. Diantara kejanggalan yang diungkap dalam buku putih tersebut adalah dugaan adanya intervensi partai politik tertentu, ketidakjelasan prosedur dan tatacara pemilihan Rais Aam dan adanya dugaan penjegalan terhadap calon tertentu.

Berdasarkan dinamika yang terjadi akibat pemberlakuan sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* untuk memilih dan menetapkan Rais 'Aam pada Mukhtamar ke-33 sebagaimana yang telah terdeskripsi di atas, maka penelitian disertasi ini akan mengkaji secara spesifik tentang Konstruksi sistem *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang diberlakukan tersebut dalam bingkai fiqh siyasah. Sebelum melakukan kajian lebih lanjut, peneliti terlebih dahulu menguraikan berbagai

8. Konsep sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dalam pemilihan Rais 'Aam pada Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama dalam kajian fiqh siyasah.
9. Prosedur pemilihan Majelis *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* pada pemilihan Rais 'Aam dalam kajian Fiqh Siyasah.
10. Implementasi penerapan *sistem Ahlul Halli Wal 'Aqdi* pada pemilihan Rais 'Aam dalam kajian Fiqh Siyasah.

Tentunya masih banyak masalah-masalah yang dapat dieksplorasi dan diidentifikasi yang terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam disertasi ini. Namun demikian, mengingat keterbatasan dan kemampuan serta kesempatan, maka peneliti membatasi kajian disertasi ini pada permasalahan pemberlakuan sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* untuk memilih dan menetapkan Rais 'Aam yang diimplementasikan dalam Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan pada tanggal 1-5 Agustus 2015 di Kabupaten Jombang Jawa Timur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi dan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, serta memperhatikan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dilakukan pembatasan dalam ruang lingkup kajiannya agar lebih fokus dan terarah, maka penelitian ini akan mengkaji permasalahan yang terumuskan dalam pertanyaan mayor tentang bagaimana konstruksi sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* pada pemilihan Rais 'Aam Nahdlatul Ulama dalam kajian Fiqh Siyasah: Studi Kasus Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama .

dengan pendekatan fikih dalam politik, bukan pada aspek dinamika politik internal Nahdlatul Ulama, khususnya yang terkait dengan suksesi kepemimpinan dalam forum Muktamar atau Konferensi. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Martin Van Bruinessen dan Choirul Anam, walaupun secara luas menguraikan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama dan perkembangannya, akan tetapi tidak mengkaji persoalan dinamika suksesi kepemimpinan khususnya yang terkait dengan pemilihan Rais 'Aam yang menggunakan sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*. Begitu juga penelitian dan kajian yang dilakukan oleh Moh. Shadiq secara khusus mengeksplorasi dinamika pemilihan ketua umum PBNU yang berujung pada terpilihnya KH. A. Hashim Muzadi pada muktamar Nahdlatul Ulama ke-30 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.

Dengan demikian penelitian yang mengkaji Konstruksi Sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* pada pemilihan Rais 'Aam Nahdlatul Ulama dalam kajian Fiqh Siyasah: Studi Kasus Mukatamar ke-33 Nahdlatul Ulama tahun 2015 di Kabupaten Jombang, sejauh ini dapat dikatakan merupakan penelitian yang pertamakali dilakukan, terlebih penelitian ini mengeksplorasi kasus yang baru terjadi dengan perspektif fiqh siyasah yang selama ini hanya digunakan untuk mengkaji persoalan politik praktis atau kepartaian yang berujung pada perebutan kekuasaan formal kenegaraan. Untuk itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi dinamika politik internal

Bab Pertama adalah Pendahuluan. Bab ini mengemukakan rancangan penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Penelitian Terdahulu, Pendekatan dan Metode Penelitian. Adapun Metode penelitian yang digunakan meliputi: Jenis Penelitian, Data Penelitian, Sumber Data Penelitian, Tehnik Pengumpulan Data serta Tehnik Pengolahan dan Analisis Data, sedangkan sub bab terakhir adalah tentang Sistematika Bahasan.

Bab Kedua Menyajikan bahasan tentang Kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama menurut perspektif Fiqih Siyasa yang meliputi latar belakang sosial dan ideologis lahirnya Nahdlatul Ulama, Faham ke Ulaman sebagai pedoman kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama, Idiologi sosial keagamaan dan fikrah Nahdliyah sebagai dasar kepemimpinan Nahdlatul Ulama, Metode Istimbath Hukum sebagai Instrumen merumuskan kebijakan kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama serta Kepemimpinan Ulama dalam Nahdlatul Ulama.

Bab Ketiga Menyajikan bahasan tentang Penerapan *Sistem Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi* dalam Mukhtar Nahdlatul Ulama yang terdeskripsikan dalam pemaparan sebagai berikut: Sukses Kepemimpinan dalam lintasan Mukhtar Nahdlatul Ulama dan Penerapan sistem *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi* dalam Mukhtar ke-27 tahun 1984 di Situbondo.

Bab Keempat Menyajikan data tentang konstruksi sistem *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi* pada pemilihan Rais 'Aam dalam Mukhtar ke 33 yang meliputi:

Latar belakang diberlakukannya Sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* pada pemilihan Rais 'Aam dalam Mukhtar Nahdlatul Ulama ke 33, konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang diterapkan sebagai sistem pemilihan Rais 'Aam dalam Mukhtar ke 33 Nahdlatul Ulama serta Implementasi sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* pada pemilihan Rais 'Aam dalam Mukhtar ke 33 Nahdlatul Ulama.

Bab Kelima Pada bab ini akan dilakukan kajian dan analisis terhadap latar belakang diberlakukannya Sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* pada pemilihan Rais 'Aam dalam Mukhtar ke-33 Nahdlatul Ulama, Analisis terhadap Konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang diterapkan sebagai sistem pemilihan Rais 'Aam dalam Mukhtar ke-33 Nahdlatul Ulama dan analisis terhadap implementasi sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* pada pemilihan Rais 'Aam dalam Mukhtar ke-33 Nahdlatul Ulama.

Bab keenam Merupakan rumusan hasil penelitian yang termuat dalam tiga sub bab yaitu : Kesimpulan, Implikasi Teoritik, Keterbatasan Studi dan Saran serta Rekomendasi

Dari rumusan sikap tersebut, maka diharapkan terbentuk perilaku kemasyarakatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta terbangun perilaku politik sebagai berikut :

- a) Menjunjung tinggi norma agama dan budaya yang mengandung nilai-nilai kebaikan, kesantunan serta keadaban.
- b) Mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi maupun golongan.
- c) Menjunjung tinggi sifat keikhlasan dalam berkhidmah serta berjuang.
- d) Menjunjung tinggi persaudaraan (*Ukhuwah*), persatuan (*Ittihād*), serta saling kasih mengasihi antar sesama.
- e) Meluhurkan kemuliaan moral (*Akhlaq al Karimah*), dan menjunjung tinggi kejujuran (*Al- Ṣidqu*) dalam berfikir, bersikap dan bertindak.
- f) Menjunjung tinggi kesetiaan (*Loyalitas*) kepada bangsa dan Negara.
- g) Menjunjung tinggi nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT.
- h) Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahlinya.
- i) Selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa kemaslahatan bagi manusia.
- j) Menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu dan mempercepat perkembangan masyarakatnya.

Mempertahankan tradisi lama yang masih relevan, dan responsive terhadap gagasan dan pemikiran baru yang lebih baik dan relevan.¹⁶¹

Kaedah ini menjadi dasar Nahdlatul Ulama untuk senantiasa menjaga tradisi yang telah diwariskan oleh para pendahulu serta dituntut untuk responsibel terhadap berbagai kemajuan yang berkembang dalam setiap zaman.

Dengan mengacu kepada kaedah-kaedah diatas, metode istimbath hukum yang dilakukan oleh kalangan intelektual progresif Nahdlatul Ulama khususnya yang terkait dengan persoalan politik atau siyasah, dapat dikatakan berbeda dan cenderung melampaui konsep dan logika berfikir tekstualis dan normative yang selama ini dijadikan pijakan dan metode berfikir yang lazim dalam Nahdlatul Ulama, akan tetapi pada sisi yang lain dinamika intelektualitas dalam Nahdlatul Ulama berkembang dengan dinamis dan konstruktif terlebih dalam menyikapi berbagai macam persoalan sosial kemasyarakatan yang semakin rumit dan harus secara cepat ditanggapi serta dirumuskan status hukumnya.

Berdasarkan metode Istimbat hukum yang telah dipaparkan diatas, seorang pemimpin didalam menjalankan dan mengelola organisasi Nahdlatul Ulama memiliki acuan terarah yang selaras dengan ketentuan Shariat dan aturan organisasi, sehingga setiap kebijaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan secara agama, moral dan organisasi. Aspek inilah

¹⁶¹Rumusan kaedah tersebut diatas terformulasikan dari kajian progresif yang dilakukan oleh pemikir dan intelektual muda Nahdlatul Ulama sebagaimana yang dapat dilihat dalam catatan penyunting yang disampaikan oleh Imam Ghazali Said dalam kitab *Ahkam al-Fiqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-199 M)* (Surabaya : PT. Diantama, 2004), xlix.

lahirnya Nahdlatul Ulama, kepemimpinan kyai semakin menampakkan bentuknya dalam formulasi yang cukup jelas. Penempatan lembaga Shuriyah pada struktur tertinggi dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama, merupakan bukti perwujudan supremasi kepemimpinan kyai khususnya didalam mengarahkan, membina dan membimbing umat.

Supremasi Ulama dalam kelembagaan Syuriah Nahdlatul Ulama lebih diperkuat kembali otoritas dan kepemimpinannya setelah tercederai oleh beberapa kasus perlawanan yang dilakukan oleh Idham Chalid dan Subchan ZE. Upaya penguatan kelembagaan Syuriah Nahdlatul Ulama ini dilakukan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama di Situbondo pada tahun 1404 H. Dalam kegiatan tersebut secara khusus dibentuk komisi pemulihan khittah Nahdlatul Ulama 1926, dengan menghasilkan keputusan yang menyatakan bahwa wewenang ulama (Syuriah) perlu dipertegas sesuai dengan fungsi pengendali Nahdlatul Ulama dengan rumusan sebagai berikut:

- a. Bahwa pengurus Nahdlatul Ulama disemua tingkatan adalah pengurus Syuriah (Ulama)
- b. Bahwa yang dipilih oleh musyawarah mulai dari Mukhtamar sampai rapat anggota hanyalah pengurus Syuriah
- c. Bahwa pengurus pelaksana (Tanfidhiyah) diangkat dan diberhentikan oleh pengurus syuriah dengan mempertimbangkan hasil musyawarah.

d. Sebagai imbalan terhadap besarnya wewenang Syuriah, perlu diadakan persyaratan yang lebih ketat untuk dapat dipilih menjadi pengurus Syuriah disemua tingkatan.¹⁷⁷

Dengan keputusan tersebut, maka otoritas dan kepemimpinan ulama dalam Nahdlatul Ulama mendapatkan peneguhan yang kuat, sehingga dibutuhkan figur ulama yang mumpuni dan memenuhi kualifikasinya. Dengan demikian kepemimpinan dan kekuasaan yang kuat dari ulama dalam hal memutuskan kebijaksanaan organisasi, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang terkait dengan persoalan agama, haruslah dilakukan secara kolektif dalam kelembagaan Syuriah yang semua anggotanya terdiri dari para ulama. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat, walaupun terdapat dominasi ulama yang dianggap paling senior dan paling dihormati sebagai rujukan utamanya.

Dengan dipetegasnya kewenangan dan otoritas ulama dalam kelembagaan Syuriah oleh komisi khittah, maka kewibawaan lembaga Syuriah kembali seperti pada saat pertamakali Nahdlatul Ulama didirikan, yaitu menempatkan kyai atau ulama sebagai memegang posisi kunci dalam Nahdlatul Ulama. Hal ini disebabkan karena ulama diyakini sebagai penerus estafet kepemimpinan para nabi dan rasul-rasul Allah SWT, sehingga terjamin moralitas dan akhlaqul karimahnyanya. Berdasarkan pemahaman tersebut para kyai dalam kelembagaan Syuriah diyakini dapat

¹⁷⁷ Rumusan pemulihan khittah Nahdlatul Ulama yang dihasilkan dalam forum Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada tanggal 13-16 Rabiul Awwal 1404/18-21 Desember 1983 di pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo.

memutuskan dan mendaulat kembali secara bulat KH. M. Hashim Ash'ari sebagai Rais Akbar dan menunjuk KH. Ahmad Noer sebagai Ketua Umum.

Muktamar Ke Sembilan dilaksanakan di Banyuwangi pada tanggal 21-26 April 1934. Dalam Muktamar ini juga mengamanatkan kembali KH. M. Hashim Ash'ari sebagai Rais Akbar dan menunjuk KH. Ahmad Noer sebagai Ketua Umum.²⁰³Muktamar Ke Sepuluh dilaksanakan di Solo-Surakarta Jawa Tengah pada tanggal 13-18 April 1935. Pada muktamar ini memutuskan kembali KH. M. Hashim Ash'ari sebagai Rais Akbar dan menunjuk KH. Ahmad Noer sebagai Ketua Umum.²⁰⁴Muktamar Ke sebelas dilaksanakan di Banjarmasin pada tanggal 19-22 Rabiul Awwal 1355 atau bertepatan dengan tanggal 09-12 Juli 1936. Muktamar ini juga mengamanahkan kembali KH. M. Hashim Ash'ari sebagai Rais Akbar dan menunjuk KH. Ahmad Noer sebagai Ketua Umum.

Muktamar Ke Dua belas dilaksanakan di Malang pada tanggal 12-15 Rabiul Tsani 1356 H yang bertepatan dengan tanggal 22-25 Maret 1937. Muktamar ini dihadiri oleh 84 Cabang se Nusantara serta dibentuk tiga cabang baru di Sumbawa besar dan Palembang. Dalam Muktamar ini diputuskan KH. M. Hashim Ash'ari sebagai Rais Akbar, sedangkan untuk ketua umum tanfidziyah dipercayakan kepada ulama muda potensial yaitu

²⁰³ Dalam Muktamar ke sembilan ini, Nahdlatul Ulama memberikan kesempatan kepada KH. Mahfudh Siddiq selaku ulama muda berbakat untuk menempati posisi orang kedua dalam jajaran pengurus Tanfidhiyah yang saat itu dijabat oleh KH. M. Noer, lihat dalam risalah Muktamar IX dalam dokumen Museum Nahdlatul Ulama Nomor : B. 120090025.2.

²⁰⁴Berita Nahdlatul Ulama No. 2.th.VI, 15 Nopember 1936 dalam Dokumen Museum Nahdlatul Ulama

pada tanggal 25 Juli 1947 setelah mendapat laporan bahwa Agresi militer Belanda berhasil merebut Markas Besar Hizbullah. Mukhtar ini juga menunjuk KH. Nahrawi Thohir sebagai Ketua Umum. Sejak mukhtar ke tujuh belas ini sebutan Rais Akbar untuk posisi pimpinan tertinggi dalam Nahdlatul Ulama diganti dengan sebutan Rais 'Aam.

Mukhtar Ke Delapan belas dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 30 April-03 Mei 1950. Dalam Mukhtar ini diputuskan kembali KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai Rais 'Aam dan menunjuk KH. Nahrawi Thohir sebagai Ketua Umum. Mukhtar Ke Sembilan belas dilaksanakan di Palembang pada tanggal 28 April- 1 Mei 1952. Pada mukhtar ini Nahdlatul Ulama memutuskan untuk keluar dari Masyumi dan bermetamorfosis menjadi Partai Politik Nahdlatul Ulama. Dalam Mukhtar ini juga ditetapkan secara aklamasi KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai Rais 'Aam dan menunjuk KH. Abdul Wahid Hashim sebagai Ketua Umum.

Mukhtar Ke Dua puluh dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 08-13 September 1954. Mukhtar ini merupakan Mukhtar pertama Nadlatul Ulama setelah berubah menjadi Partai Politik sehingga forum tersebut dijadikan ajang konsolidasi untuk persiapan pemilihan umum yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955. Dalam Mukhtar ini diputuskan secara aklamasi KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai Rais 'Aam dan menunjuk KH. M. Dahlan sebagai Ketua Umum, setelah KH. Abdul Wahid Hashim Wafat dalam kecelakaan pada tanggal 19 April 1953.

beliau mengundurkan diri sehingga posisi Rais 'Aam dijabat oleh KH. Ilyas Ruchyat.

Muktamar Ke Dua puluh sembilan dilaksanakan di Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat. Muktamar ini dibuka oleh Presiden Soeharto pada tanggal 1-5 Desember 1994. Dalam Muktamar ini intervensi dari kekuatan di luar Nahdlatul Ulama terasa kuat dengan munculnya kandidat yang sebelumnya tidak begitu dikenal dalam lingkaran utama Nahdlatul Ulama yang bernama Abu Hasan.

Dukungan Aklamasi yang diperoleh Abdurrahman Wahid ketika Muktamar ke 28 di Yogyakarta berubah menjadi 55 % ketika proses pemilihan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Muktamar ke 29 ini, sehingga ketika proses penyusunan kepengurusan hasil Muktamar ke 29 ini tidak terjadi kompromi yang diharapkan, faksi yang mendukung dan mengajukan Abu Hasan sebagai ketua umum PBNU menyelenggarakan Konferensi Besar dan Musyawarah Luar Biasa (MLB) yang mengatas namakan Koordinasi Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama (KPPNU) pada tanggal 17-19 Januari 1996 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.²¹⁷

Akan tetapi dengan adanya pernyataan dan pengakuan pemerintah sebagaimana yang disampaikan menteri dalam negeri Yogie S. Memet dan menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal Edi Sudrajat bahwa Muktamar Cipasung sah dan Konstitusional, maka perlahan perlawanan yang dilakukan

²¹⁷ M. Fajrul Falakh, *Pelajaran dari Kemelut NU*, dalam buku *Geger di Republik NU; Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsir Makna*(Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, 1999), 26-27.

mufakat ini merupakan bentuk aktualisasi dari faham keulamaan yang berpegang teguh kepada otoritas ulama untuk mengarahkan dan mengayomi ummat khususnya yang tergabung dalam wadah Nahdlatul Ulama.

Untuk mengkaji lebih detail aspek-aspek yang terkait dengan kepemimpinan ulama serta memahami bentuk dan mekanisme dari sistem musyawarah untuk mufakat didalam memilih dan menetapkan kepemimpinan, maka dalam bab selanjutnya akan diuraikan secara detail aspek-aspek tersebut.

C. Penerapan sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dalam Muktamar ke 27 Nahdlatul Ulama di Situbondo

Penerapan sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dalam Nahdlatul Ulama untuk pertamakalinya secara spesifik diterapkan dalam Muktamar ke XXVII yang dilaksanakan di Situbondo Jawa Timur. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh ketidak patuhan yang dilakukan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada saat itu yang dijabat oleh Idham Khalid yang pada Muktamar NU Ke-25 yang diselenggarakan pada tanggal 20-25 Desember 1971 di kota Surabaya yang diminta untuk tidak mencalonkan kembali sebagai ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Setidaknya KH. As'ad Shamsul Arifin sudah meminta Idham Khalid untuk mundur dan tidak mencalonkan kembali sebagai ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan dalih dan argumentasi takut timbul penilaian negatif bila Nahdlatul Ulama terus menerus dipimpin oleh Idham

para Ulama dan kelembagaan syariah khususnya. Karena sikap mencabut kembali pernyataan pengunduran diri yang dinilai kurang etis dan menyalahi tatakrama dalam Nahdlatul Ulama tersebut, maka persoalannya menjadi semakin serius serta melebar kepada penilaian konsistensi dan loyalitas Idham Khalid terhadap nilai-nilai kejujuran, kesantunan dan ketaatan yang berlaku dilingkungan Nahdlatul Ulama, sehingga apapun yang dilakukan Idham Khalid untuk membangun kembali kehormatan dan reputasinya semakin membikin jarak dengan para ulama sepuh Nahdlatul Ulama.

Apa yang telah dilakukan dan diperbuat Idham Khalid direspon oleh para Ulama dan menjadi bahasan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Pesantren Asembagus Situbondo pada bulan Desember 1983 yang tidak dihadiri Idham Khalid. Satu di antara keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama tersebut adalah mengembalikan NU ke posisi awal, yang kemudian dikenal kembali ke khittah 1926. Maksud sesungguhnya “kembali ke Khittah 1926” adalah satu aspeknya mengembalikan kewibawaan ulama, mengembalikan peran dan fungsi serta otoritas ulama. Dan itu berarti, menjaga dan melestarikan paham keulamaan sebagai salah satu sistem nilai yang selama ini berlaku dalam tubuh Nahdlatul Ulama.

Setelah terlaksananya Musyawarah Nasional Alim Ulama secara sukses, maka para ulama yang dimotori oleh KH. As'ad Shamsul Arifin melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah guna mempersiapkan Mukhtamar ke 27 yang juga dilaksanakan di pondok Pesantren Salafiyah yang

BAB IV

DESKRIPSI SISTEM *AHLUL HALLI WAL 'AQDI* PADA PEMILIHAN RAIS 'AAM DALAM MUKTAMAR KE 33 NADLATUL ULAMA

Dalam peristiwa Mukhtamar dari masa ke masa sebagaimana yang telah dideskripsikan secara kronologis dalam bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa Nahdlatul Ulama telah dipimpin oleh sembilan orang Rais 'Aam yang dipilih melalui proses musyawarah mufakat maupun proses voting. Dinamika pemilihan Rais 'Aam mulai tampak jelas sejak mukhtamar ke-27 yang dilaksanakan di Situbondo, sehingga para ulama dalam forum Mukhtamar tersebut memberikan mandat kepada KH. As'ad Shamsul Arifin sebagai *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang didampingi oleh KH. Ali Maksum, KH. Mahrus Ali, KH. Masjkur, KH. Ahmad Siddiq, KH. Syaifuddin Zuhri, dan KH. Munasir Ali, untuk memilih dan mengangkat Rais 'Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasca Mukhtamar ke-27 tersebut, dinamika pemilihan Rais 'Aam terus berkembang dengan diberlakukannya sistem voting atau pemungutan suara yang menghadapkan antar kandidat untuk memperebutkan posisi Rais 'Aam. Sistem pemilihan Rais 'Aam berdasarkan suara terbanyak yang dilakukan secara terbuka ini dirasakan oleh para Ulama kurang cocok untuk organisasi Nahdlatul Ulama yang mengedepankan nilai-nilai kesantunan dan ketawadluan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dirumuskanlah sistem pemilihan Rais 'Aam yang selaras dan sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi pedoman dan pegangan Nahdlatul Ulama yang disebut sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang berbeda dengan sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang digunakan pada Mukhtamar ke-27 di Situbondo

Keprihatinan akan kondisi tersebut menjadi perhatian serius para ulama dan fungsionaris Nahdlatul Ulama disemua tingkatan. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur secara konkrit membuat rumusan sistem pemilihan dengan inovasi baru yang diharapkan dapat menjaga muru'ah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi ulama serta menghindari intervensi kepentingan politik praktis yang dapat merusak citra Jama'ah dan Jam'iyah Nahdlatul Ulama.

Latar belakang gagasan perlunya sistem baru dalam memilih pimpinan Nahdlatul Ulama menurut kajian dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur adalah mudurnya wibawa ulama yang secara formal diwadahi oleh kelembagaan syuriah. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh hegemoni kekuatan politik praktis yang melakukan infiltrasi dan intervensi dalam proses pemilihan kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama di setiap level. Intervensi tersebut dilakukan dengan cara menumbuh kembangkan *rishwah* atau *money politics* untuk mendukung calon yang dikehendaki.²³⁰

Untuk membendung dan meminimalisasi pengaruh dan dampak yang ditimbulkan oleh adanya infiltrasi dan intervensi dari kalangan eksternal Nahdlatul Ulama tersebut, tentu harus dirumuskan formulasi dan sistem pemilihan dalam suksesi kepemimpinan Nahdlatul Ulama yang tepat dan sesuai dengan tuntunan agama dan para ulama. Berawal dari keprihatinan tersebut Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur mengusulkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama rumusan sistem pemilihan yang

²³⁰ Konsep *Ahlul Halli wal Aqdi* : Tatacara Pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU dalam Dokumen Usulan PWNU Jawa Timur yang presentasikan dalam MUNAS Alim Ulama dan KONBES pada tanggal 14-15 Juni 2015.

Abdul Mun'im DZ sebagai sekretarisnya. Tim tersebut secara cepat melaksanakan amanat dengan melakukan pengkajian dan penelitian, sehingga dihasilkan sebuah naskah akademik yang memadai terkait dengan cakupan landasan nilai-nilai keagamaan, dasar-dasar filosofis, acuan historis, hingga pertimbangan-pertimbangan terkait dengan dinamika sosial politik mutakhir yang mengharuskan diterapkannya sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* sebagai model pemilihan kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatan.²³²

Naskah Akademik sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang dirumuskan oleh tim khusus dibahas dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar ke-2 pada tanggal 2-3 Nopember 2014 di Jakarta dengan hasil sebagai berikut :

1. Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama menyepakati dan menetapkan diberlakukannya sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dalam pemilihan kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Akan tetapi penerapannya dilaksanakan secara bertahap untuk mengidentifikasi berbagai macam hal yang perlu disempurnakan dari waktu ke waktu, sehingga penerapannya dimulai dari pemilihan Rais 'Aam dan Rais-Rais Syuriah di setiap tingkatan. Sedangkan untuk pemilihan ketua umum dan ketua-ketua Tanfidhiyah di semua tingkatan tetap menggunakan sistem pemilihan secara langsung.

²³² Lampiran Surat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomo : 320 /A.II.04/12/2013 teranggal 4 Shafar 1435 H / 07 Desember 2013 tentang tim penyusun Konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*.

menjadi keputusan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama ke 3 yang dilaksanakan pada tanggal 14-15 Juni 2015 di Jakarta.

Sedangkan konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dalam naskah akademik yang dihasilkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama didasarkan atas sejarah bahwa sejak awal berdirinya Nahdlatul Ulama menegaskan diri sebagai organisasi sosial keagamaan Islam yang berhaluan akidah *Ahlussunnah Wal Jama'ah* dengan membangun visi kebangsaan dan keindonesiaan. Nahdlatul Ulama akan selalu terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir dan batin serta dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Untuk mewujudkan cita ideal tersebut, mutlak dibutuhkan kehadiran pemimpin yang konsisten dengan fikrah *Tawassuthiyah* (moderat), *Tasamuiyyah* (toleran), *Ishlahiyyah* (reformatif), *Tathawuriyah* (dinamis) dan *Manhajiyah* (metodologis) sehingga mampu melakukan kewajiban *hirasatud din wa siyasatud dun nya* secara bijak dan dinamis.

Untuk menjamin konsistensi semua pihak pada sikap tersebut, Nahdlatul Ulama harus konsisten pada khittahnya sebagai organisasi sosial keagamaan yang menempatkan ulama pada posisi tertinggi. Syuriah harus memiliki supremasi atas Tanfidhiyah sehingga mampu mengumandangkan

- c) Untuk memilih pemimpin yang baik tidak dapat dilakukan secara sembarangan, namun memerlukan pengetahuan, kejujuran dan kearifan. Persyaratan inilah yang tidak dimiliki setiap orang. Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, fiqh sunni menawarkan konsep perwakilan, sehingga pemimpin tidak dipilih secara langsung oleh seluruh ummat, melainkan sekelompok ummat yang merepresentasikan mereka, sistem perwakilan ini lazim disebut *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*.
- d) Banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*, dari persyaratan tersebut yang paling substansial adalah keadilan, kejujuran, kearifan dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang calon pemimpin. Apabila syarat-syarat tersebut tidak seluruhnya terpenuhi oleh *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*, maka ditempuh kebijakan untuk memilih yang terbaik dari yang ada.
- e) Secara definitif *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* menunjuk kepada sekelompok ummat yang dipandang mampu mewakili dan merepresentasikan kehendak ummat yang terdiri dari ulama, pemimpin ummat (*Ru'asaul ummat*) dan tokoh masyarakat (*wujuhunnas*).
- f) Jumlah anggota *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi. Forum bahsul masail pra munas tanggal 29-31 Mei 2014 di Jakarta mengusulkan jumlah Anggota *Ahlul Halli wal 'Aqdi* Sembilan orang.
- g) Mengingat setiap zaman memiliki karakter dan problem yang berbeda, maka susunan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dibatasi dengan periode tertentu.

Banten, dua orang dari wilayah Kalimantan, dua orang dari wilayah Sulawesi, satu orang dari wilayah Nusatenggara, satu orang dari wilayah Maluku dan Papua dan satu orang dari wilayah yang mewakili Cabang Istimewa.

- b. *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dipilih melalui musyawarah mufakat oleh pimpinan masing-masing zona wilayah yang telah ditentukan.
- c. *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dipilih dari ulama atau sesepuh yang memiliki sejarah pengabdian yang menonjol serta kepedulian yang tinggi untuk kemajuan Jamiyah Nahdlatul Ulama.
- d. *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*.
- e. *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* memilih satu nama untuk jabatan Rais 'Aam yang berasal dari dalam maupun dari luar anggota *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*.
- f. Untuk dapat dipilih menjadi Rais 'Aam atau wakil Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang bersangkutan pernah duduk sebagai Rais 'Aam, wakil Rais 'Aam, Rais, katib 'Aam, Ketua Umum, Ketua dalam level Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau Rais Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
- g. Sebelum proses pemilihan dimulai, segenap *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* melakukan shalat hajat dan Istikharah memohon bimbingan dari Allah SWT untuk dianugrahi figure terbaik untuk masing-masing jabatan dimaksud.

yang dibahas dalam Musyawarah Alim Ulama ke tiga pada tanggal 14-15 Juni 2015 di Jakarta, sehingga menghasilkan ke Keputusan yang menjadi acuan yang diberlakukan dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang.

Adapun keputusan Musyawarah Alim Ulama Nahdlatul Ulama tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, menjelaskan bahwa kepemimpinan Nahdlatul Ulama terdiri dari kepemimpinan Syuriah dan Tanfidhiyah, kepemimpinan Shuriah adalah pimpinan tertinggi di Jamiyah Nahdlatul Ulama sedangkan kepemimpinan Tanfidhiyah adalah pimpinan pelaksana organisasi. Dalam keputusan ini juga di jelaskan bahwa Pemilihan adalah permusyawaratan untuk memilih *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*, permusyawaratan adalah rapat yang dilakukan oleh *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* untuk menentukan Rais 'Aam PBNU, dan Rais pada tingkat PWNU, PCNU/PCINU, MWCNU, Ranting dan Anak Ranting NU. Sedangkan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* adalah beberapa orang ahli yang bertugas memilih pimpinan tertinggi yang mempertimbangkan keterwakilan wilayah/daerah baik struktural maupun kultural dengan kriteria tertentu.

Keputusan ini juga menjelaskan bahwa Rais 'Aam adalah pimpinan tertinggi organisasi PBNU, sedangkan Rais Syuriah adalah pimpinan tertinggi organisasi ditingkat bahwahnya, sedangkan ketua umum adalah pimpinan

arahan dari panitia nasional melakukan komunikasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga ada kesepakatan yang ditandatangani bersama yang menyatakan bahwa bagi peserta yang belum melengkapi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan, akan melengkapi persyaratan tersebut setelah dilakukan proses pendaftaran peserta.

Eskalasi politik internal dalam perhelatan Mukhtar ke-33 Nahdlatul Ulama semakin menajam pada forum persidangan tata tertib Mukhtar. Hal ini dipicu oleh perdebatan dalam persidangan yang membahas tata tertib Mukhtar ke-33 Nahdlatul Ulama ketika memasuki bab VII pasal 19 yang mengatur mekanisme pemilihan Rais 'Aam dan Ketua Umum yang mengalami kebuntuan karena tidak ada kata sepakat antara muktamirin. Situasi ini mengakibatkan ketua sidang melakukan skorsing persidangan untuk dilakukan komunikasi informal guna mencapai titik temu akibat muktamirin terbelah menjadi dua faksi yang setuju penerapan sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* diterapkan dalam forum Mukhtar ke-33 di Jombang ini, serta faksi yang tidak setuju terhadap penerapan sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* sehingga mereka menghendaki untuk tetap diterapkan pola voting dalam memilih Rais 'Aam maupun Ketua Umum PBNU.

Masing-masing faksi mengajukan argumentasi yang sama-sama kuat dan rasional berdasarkan berbagai macam aspek pertimbangan yang menjadi pegangannya, sehingga KH. Achmad Musthafa Bisri yang menjadi Pejabat Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengundang seluruh jajaran pengurus syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan seluruh Rais Syuriah

tata tertib persidangan pada bab VII pasal 19 atukah tidak diterapkan. Sebelum dimuali proses pemungutan suara tersebut KH. Yahya Cholil Saquf selaku pimpinan sidang meminta kepada panitia bidang persidangan untuk melakukan verivikasi ulang terhadap Rais Shuriah yang hadir dalam forum tersebut.²⁷³

Proses pemungutan suara tersebut dilakukan dengan cara mencoret salah satu kalimat yang terdapat dalam kertas yang bertuliskan setuju atau tidak setuju dengan secara langsung dibacakan di depan forum persidangan. Proses yang dimulai pada pukul 17.00 WIB tersebut berakhir pada pukul 21.00 WIB dengan hasil 252 (dua ratus lima puluh dua) suara menyatakan setuju untuk di terapkan dan di implementasikan sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, serta 235 (dua ratus tiga puluh lima suara) yang menyatakan menolak diberlakukannya sistem tersebut dan sembilan suara menyatakan abstain.²⁷⁴ Berdasarkan hasil sidang khusus Rais Syuriah tersebut, KH. Yahya Cholil Tha'qif selaku pimpinan sidang mengesahkan sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* diberlakukan dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama.

²⁷³Proses verivikasi ulang tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa yang hadir dan yang menentukan pilihan adalah benar-benar Rais Syuriah atau Rais yang diberikan mandat oleh Rais Syuriah untuk memilih sebagaimana yang telah menjadi amanat Pejabat Rais 'Aam yang telah disetujui oleh Muktamirin. Proses verivikasi tersebut diawasi dan dipantau langsung oleh KH. Abdul Malik Madani selaku Katib 'Aam serta KH. Masdar Farid Masudi, KH. Ahmad Ishomuddin dan KH. Afifuddin Muhajir selaku perwakilan dari jajaran Rais Syuriah PBNU.

²⁷⁴ Hasil dari sidang khusus Rais Syuriah tersebut dituangkan dalam berita acara persidangan yang ditandatangani oleh KH. Yahya Cholil Saquf selaku pimpinan sidang dan KH. Ahmad Ishomuddin selaku sekretaris sidang, serta ditandatangani oleh para saksi yaitu KH. M. Yahya Matdoan dari PCNU Asmat Papua, KH. Khaeri, MSi yang merupakan rais syuriah PCNU Ogan Komering Ulu sumatra selatan serta KH. Ashhari Abta Rais Syuriah PWNU DIY.

Pada tanggal 5 Agustus 2015 agenda persidangan dilanjutkan untuk pemilihan Rais 'Aam. Persidangan ini dipimpin oleh Prof. Akh. Muzakki, Grad. Dip. SEA, M.Ag, M. Phil. P.hD sebagai ketua sidang yang didampingi oleh Drs. Amanullah Amit, SH sebagai wakil ketua dan Ir. Lalu Winengan sebagai sekretaris sidang pleno pemilihan. Sebelum persidangan tersebut dilanjutkan, KH. Yahya Cholil Saqif selaku pimpinan sidang khusus shuriah yang dilakukan pada tanggal 4 Agustus di Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar diberikan waktu untuk menyampaikan hasil sidang khusus Rais Syuriah yang menghasilkan keputusan memberlakukan sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* pada Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang.

Berdasarkan keputusan sidang khusus Rais Syuriah se Indonesia tersebut, maka sidang pleno pemilihan Rais 'Aam memutuskan untuk memberlakukan sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dalam memilih Rais 'Aam dengan tahapan sebagai berikut :

1. Seluruh Pengurus Cabang dan Pengurus Wilayah mengusulkan calon anggota *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* sebanyak banyaknya sembilan orang secara resmi yang ditandatangani oleh Rais Syuriah dan Katib Syuriah dengan distempel basah oleh masing-masing pengusul sesuai dengan tingkatannya.
2. Sembilan nama usulan calon anggota *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* diserahkan kepada panitia Mukhtamar ke 33 Nahdlatul Ulama dalam amplop tertutup dan langsung dimasukkan kedalam kotak yang telah disediakan.

3. Panitia Mukhtamar melakukan tabulasi dengan menghitung usulan nama-nama calon anggota *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dalam sidang tersebut secara terbuka dan transparan.
4. Berdasarkan tabulasi dan perhitungan yang dilakukan oleh Panitia Mukhtamar ke 33 Nahdlatul Ulama atas usulan calon *Ahlu Hall Wal 'Aqdi* tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Nama Ahlul Halli Wal Aqdi	Jumlah Perolehan Suara
1	KH. Makruf Amin	333 Suara
2	KH. Nawawi Abdul Jalil	302 Suara
3	KH. TG. Turmudhi Badruddin	298 Suara
4	KH. Kholilurrahman	273 Suara
5	KH. Dimyathi Rais	236 Suara
6	KH. Syaikh Ali Akbar Marbun	186 Suara
7	KH. Maktum Khannan	172 Suara
8	KH. Maimun Zubair	156 Suara
9	KH. Mas Ahmad Subadar	135 Suara
10	KH. Abunawas	132 Suara
11	KH. Anwar Manshur	122 Suara
12	KH. Sya'roni Ahmadi	114 Suara
13	KH. AGH. Sanusi Baco	101 Suara
14	KH. M. Tolchah Hasan	95 Suara
15	KH. A. Musthafa Bisri	88 Suara
16	KH. A. Hasyim Mudzadi	53 Suara
17	KH. A. Muchit Mudzadi	47 Suara
18	KH. Nurul Huda Djazuli	36 Suara
19	KH. Hafifuddin Miftach	30 Suara
20	KH. Ali Yafie	23 Suara
21	KH. Asep Burhaduddin	18 Suara
22	KH. Abuya Muhtadi	16 Suara
23	KH. Achmad Shadiq	16 Suara
24	KH. Habib Luthfi bin Yahya	16 Suara
25	KH. Shaifuddin Amsir	15 Suara
26	KH. Abun Binyamin	14 Suara
27	KH. Chotibul Umam	14 Suara
28	KH. Bagindo, M. Letter	12 Suara

- e. Dalam musyawarah lanjutan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* tersebut diputuskan bahwa KH. Makruf Amin ditetapkan sebagai Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2015-2020, dan keputusan tersebut dibacakan dalam sidang Pleno Pemilihan Rais 'Aam dan disahkan sebagai keputusan Mukhtar ke 33 Nahdlatul Ulama.

Rangkaian tahapan sebagaimana yang terdeskripsikan diatas, merupakan implementasi faktual dari sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang diterapkan pada pemilihan Rais 'Aam dalam Mukhtar ke 33 Nahdlatul Ulama di kabupaten Jombang Jawa Timur. Dengan demikian keseluruhan tahapan dalam pemilihan Rais 'Aam yang menggunakan sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* tersebut telah disepakati oleh muktamirin dan menjadi keputusan organisasi yang telah disahkan dalam persidangan tata tertib Mukhtar dan tata tertib pemilihan Rais 'Aam dalam Mukhtar ke 33 Nahdlatul Ulama.

menyampaikan sebagai berikut: sebagaimana diketahui bersama, bahwa Mukhtar ke 33 Nahdlatul Ulama ini diwarnai oleh sedikit kekisruhan yang bersumber dari adanya dua kelompok yang masing-masing menginginkan jagonya untuk menjadi Rais 'Aam, sehingga sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* inipun dianggap sebagai alat yang digunakan untuk memenangkan jago tertentu oleh kelompok yang lain. Oleh karena itu demi kemaslahatan Jamiyah dan sekaligus mengayomi kedua belah pihak yang bersaing tersebut, sebaiknya *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* tidak memilih dua nama yang dijagokan oleh kedua kelompok tersebut, jabatan Rais 'Aam biarlah diserahkan kepada salah satu dari *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang paling mendekati kriteria, sedangkan untuk ketua umum tanfidhyah biarlah Rais 'Aam terpilih merestui semua calon agar muktamirin bisa bergembira memilih pilihannya sendiri.

BAB V

ANALISIS SISTEM *AHLUL ḤALLI WAL 'AQDI* PADA PEMILIHAN RAIS 'AAM DALAM MUKTAMAR KE-33 NAHDLATUL ULAMA

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang memiliki tradisi intelektual yang dinamis dan progresif, khususnya yang terkait dengan kajian fiqih siyasah. Diantara inovasi progresif yang dilakukan adalah memberlakukan sistem *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi* dalam memilih Rais 'Aam pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama. Terminologi *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi* yang digunakan sebagai sistem pemilihan Rais Am dalam Nahdlatul Ulama ini tidak identik dengan konsep *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi* yang dikenal dalam kajian fiqih siyasah pada umumnya, walaupun substansi dan spiritnya tidak jauh berbeda.

Kesamaan substansi dan tujuan diberlakukannya *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi* sebagai sistem untuk memilih pemimpin ini menjadi dasar argumen didalam merumuskan konstruksi sistem *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi* yang relevan dengan kebutuhan organisasi serta selaras dengan cita-cita organisasi. Untuk mengetahui dan memahami secara detail tentang berbagai aspek yang melatarbelakangi pemberlakuan sistem *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi* dalam pemilihan Rais 'Aam pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, maka dalam bab ini akan dilakukan analisis pemberlakuan sistem *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi* tersebut berdasarkan kajian fiqh siyasah.

A. Analisis terhadap latar belakang diberlakukannya sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* pada pemilihan Rais 'Aam dalam Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama.

Latar belakang diberlakukannya sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* pada pemilihan Rais 'Aam dalam Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan pada tanggal 1-5 Agustus 2015 di Kabupaten Jombang Jawa Timur tidak dapat dipisahkan dari tuntutan situasi yang memungkinkan atau bahkan mengharuskan sistem tersebut diberlakukan. Dalam bahasa lain dapat dijelaskan bahwa pemberlakuan sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* merupakan ikhtiyar merubah suatu kondisi atau keadaan yang dipandang tidak selaras dengan tujuan, prinsip dan nilai dasar dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama khususnya dalam hal suksesi kepemimpinan.

Jika dikaji dalam perspektif historis, Nahdlatul Ulama sejak didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H yang bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M di Surabaya, hingga sekarang mengalami kondisi dan keadaan yang dapat diklasifikasi dalam tiga fase pemerintahan dan kekuasaan. Mulai dari pemerintahan zaman penjajahan Belanda, pemerintahan zaman penjajahan Jepang serta pemerintahan Indonesia dengan tiga periode situasi, mulai dari kekuasaan rezim orde lama, rezim orde baru serta rezim orde reformasi, serta telah dipimpin oleh tujuh orang presiden mulai dari Soekarno, Soeharto, BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Soesilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.

pelaksanaan Mukatamar ke 33 Nahdlatul Ulama di kabupaten Jombang merupakan keniscayaan, karena hukum ditetapkan dan diterapkan secara fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi yang menyertai dimana hukum tersebut ditetapkan dan diberlakukan. Akan tetapi dalam kajian fiqh siyasah yang telah ada, konsep yang melatar belakangi diberlakukannya sistem *Ahul Halli Wal 'Aqdi* dalam pemilihan Rais 'Aam tersebut menurut kajian peneliti berbeda dengan faktor yang melatar belakangi suksesi kepemimpinan sebagaimana yang terjadi pada generasi *al-khulafa al-rasyidūn* maupun generasi setelahnya yaitu masa pemerintahan Daulah Umayyah maupun Abbasiyah.

Latar belakang ditetapkan dan dibaiatnya Abu Bakar sebagai khalifah melalui proses musyawarah terbatas antara perwakilan kaum Anshar dan Muhajirin didorong oleh situasi kepanikan pasca kewafatan rasulullah SAW, sehingga harus ditentukan langkah untuk mengatasi persoalan ummat yang telah kehilangan sosok pemimpin panutan. Begitu juga ditunjuknya Umar bin Khattab sebagai khalifah oleh Abu Bakar sebagai pengganti dirinya, didasarkan atas keyakinan setelah melakukan interview terhadap beberapa sahabat yang dianggap representatif untuk diminta pendapat merupakan ijtihad personal untuk menentukan pengganti yang relevan dengan situasinya.

Uthman bin Affan dibaiat sebagai khalifah dilakukan oleh tim kecil yang dibentuk oleh Umar bin Khattab yang terdiri dari Ali bin Abi Ṭālib, Uthman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Ṭalhah bin Ubaidillah dan Abdullah bin Umar. Tim ini diberi tugas

berkomunikasi dengan para sahabat dan ummatnya. Rasulullah SAW gemar berdiskusi dan bermusyawarah atas berbagai aspek persoalan yang terjadi pada masanya khususnya yang terkait dengan persoalan yang belum ada petunjuknya dari Allah SWT.

Setelah Rasulullah SAW wafat, maka para sahabat dihadapkan pada persoalan siapakah yang mengganti Rasulullah SAW sebagai pemimpin ummat, bukan sebagai nabi akan tetapi sebagai *Khalīfah al-Rasūl* atau *Amīrul mu'minīn*, maka peristiwa suksesi kepemimpinan sepeninggal Rasulullah SAW inilah yang dijadikan acuan bagi perumusan konsep *Nasbu al-Imāmah* dalam Islam. Suksesi kepemimpinannya tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Pengangkatan Abu Bakar sebagai Khalifah**

Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama melalui sebuah proses pemilihan dalam suatu pertemuan yang berlangsung pada hari ke dua setelah Rasulullah SAW wafat dan sebelum jenazahnya dikebumikan, sehingga menimbulkan kemarahan keluarga dekat nabi khususnya Fatimah Al-Zahra, sedangkan argumen yang mendasari pertemuan tersebut adalah faktor keadaan yang tidak direncanakan karena situasi yang terjadi.

Situasi tersebut dilatar belakangi adanya pertemuan sekelompok kalangan Anshar di Thaqifah atau balai pertemuan Bani Sa'idah untuk mengangkat Saad bin Ubadah, seorang tokoh anshar dari suku Khazraj sebagai khalifah. Peristiwa ini didengar oleh Umar bin Khattab yang kemudian menemui Abu Bakar yang berada di kediaman Nabi untuk

di Kabupaten Jombang yang rumusannya dapat dideskripsikan sebagai berikut :

- a. Konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang diberlakukan dalam Mukhtamar ke 33 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang didasarkan atas kesepakatan bersama bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi para ulama yang semua pemikiran, sikap dan langkahnya didasarkan pada penegakan *akhlaqul karimah*. Dengan demikian Rais 'Aam yang diilih harus memiliki karakter dan kewibawaan tinggi yang dipilih diantara ulama yang paling alim, paling wira'i serta paling dihormati.
- b. Agar dapat memilih ulama sebagai Rais 'Aam sebagaimana dimaksud diatas, maka hanya para ulama sendiri yang memiliki kompetensi dan kecermatan baik secara lahiriyah maupun bathiniyah, baik secara intelektual maupun spiritual. Sekumpulan ulama yang layak untuk memilih Rais 'Aam inilah yang disebut sebagai *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang diusulkan oleh Pengurus Wilayah dan Cabang Nahdlatul Ulama se Indonesia.
- c. Syarat yang harus dipenuhi oleh *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* adalah keadilan, kejujuran, kearifan dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang calon pemimpin. Apabila syarat-syarat tersebut tidak seluruhnya terpenuhi oleh *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*, maka ditempuh kebijakan untuk memilih yang terbaik dari yang ada.
- d. Jumlah anggota *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi, forum bahsul masail pra Munas tanggal 29-31 Mei

Utara, dua orang dari Wilayah Sumatera bagian Selatan, dua orang dari Jawa Timur, dua orang dari Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dua orang dari Wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, dua orang dari Wilayah Kalimantan, dua orang dari Wilayah Sulawesi, satu orang dari Wilayah Nusatenggara, satu orang dari Wilayah Maluku dan Papua dan satu orang dari Wilayah yang mewakili Cabang Istimewa.

- 2) *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dipilih melalui musyawarah mufakat oleh pimpinan masing-masing zona wilayah yang telah ditentukan.
- 3) *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dipilih dari ulama atau sesepuh yang memiliki sejarah pengabdian yang menonjol serta kepedulian yang tinggi untuk kemajuan Jamiyah Nahdlatul Ulama.
- 4) *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*.
- 5) *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* memilih satu nama untuk jabatan Rais 'Aam yang berasal dari dalam maupun dari luar anggota *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*.
- 6) Untuk dapat dipilih menjadi Rais 'Aam atau wakil Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang bersangkutan pernah duduk sebagai Rais 'Aam, wakil Rais 'Aam, Rais, katib 'Aam, Ketua Umum, Ketua dalam level Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau Rais Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
- 7) Sebelum proses pemilihan dimulai, segenap *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* melakukan shalat hajat dan Istikharah memohon bimbingan dari Allah

Konstruksi nalar bayani yang dijadikan dasar oleh Nahdatul Ulama didalam merumuskan konsep dan sistem *Ahlul Halli Wal Aqdi* tersebut juga selaras dengan metode qiyasi atau ilhaqi (إلحاق المسائل بنظائرها) yaitu menyamakan hukum atas suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (ada ketetapan hukumnya). Pengertiannya adalah Konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dalam rumusan fiqh siyasah dipergunakan untuk memilih kepemimpinan formal kenegaraan dapat pula dipergunakan konsep yang serupa untuk memilih pemimpin non formal dalam organisasi kemasyarakatan yang dalam konteks ini adalah Rais 'Aam.

Kedua metode yang menjadi dasar istimbath dalam merumuskan sistem *Ahlul Halli Wal Aqdi* tersebut akan lebih sempurna dengan adanya metode *Istislahy* yaitu ber istinbath hukum tentang suatu masalah yang bertumpu pada asas kemaslahatan yang selaras dengan *Maqhasid al-syari'ah*. Adapun tujuan penggunaan metode *istislahiy* ini adalah untuk menghindarkan perselisihan dan perpecahan serta adanya praktek pemilihan pemimpin Nahdlatul Ulama yang menyimpang dari nilai-nilai agama dan hukum.

Dengan demikian konstruksi sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang dipergunakan untuk memilih Rais 'Aam telah melalui serangkaian metode istimbath hukum yang komprehenship sehingga diyakini sebagai sistem yang paling tepat untuk jami'iyah Nahdlatul Ulama. Serangkaian proses yang dilakukan mulai dari penentuan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* hingga penetapan Rais

memilih, menetapkan serta mengawasi dan memberhentikan Rais 'Aam. Karena secara harfiah makna *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* adalah sekumpulan orang terpilih yang diberikan amanat untuk melepas dan mengikat yang dalam bahasa lain dapat diartikan mengangkat dan memberhentikan pemimpin.

Berdasarkan pengertian tersebut tidaklah tepat secara etimologi dan terminologi apabila penggunaan istilah *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* digunakan untuk tugas memilih dan menetapkan Rais 'Aam saja, akan tetapi tidak melakukan pengawasan dan juga memberhentikan Rais 'Aam apabila secara nyata telah melakukan pelanggaran serta penyimpangan norma agama dan atau aturan AD/ART yang berlaku.

Dengan demikian seyogyanya rumusan konsep yang menegaskan bahwa masa jabatan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* adalah satu periode dan dapat dipilih kembali sejauh dipandang mampu merepresentasikan kebutuhan ummat perlu di adaptasikan kembali dalam aturan formal. Dengan demikian *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* tidak hanya diberlakukan sebagai sistem dalam memilih dan menetapkan Rais 'Aam atau Rais Syuriah saja, akan tetapi juga dapat difungsikan sebagai lembaga atau institusi baru dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama selain Mustasyar, A'wan, Syuriah dan Tanfidhiyah, sehingga keberadaan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dapat berperan lebih maksimal walaupun dari sisi yang lain otoritas Syuriah sebagai lembaga tertinggi dalam struktur Nahdlatul Ulama akan berada dalam pengawasan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*.

Agar terwujud keselaran dan harmoni dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama setelah mengakomodasi *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* sebagai bagian dari struktur organisasi, maka perlu dirumuskan skema tugas dan fungsi yang dapat saling menguatkan dan saling menopang diantara struktur yang telah ada agar terwujud sistem kelembagaan yang lebih dinamis dan progresif.

Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah memperkuat dan memperluas kewenangan dan fungsi Mustasyar dengan memposisikan para ulama yang terpilih sebagai *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dalam struktur tersebut, sehingga fungsi sebagai penasehat juga di lengkapi dengan fungsi pengawasan serta kehakiman sebagai instrumen pengontrol dan pemutus terhadap adanya penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh pemimpin yang diangkat oleh *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*.

Dasar pertimbangan yang memungkinkan untuk dijadikan acuan rasional agar *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dapat dijadikan sebagai bagian dari struktur organisasi dalam Nahdlatul Ulama adalah faham ke Ulamaan yang selama ini dijadikan pedoman dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Paham ini selaras dengan keberadaan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang merupakan ulama terpilih yang diusulkan secara berjenjang dari bawah. Dengan demikian para Ulama tersebut memiliki legitimasi yang signifikan apabila diakomodasi dalam sebuah struktur tersendiri untuk memperkuat keberadaan sistem kelembagaan dalam organisasi Nahdlatul Ulama disamping institusi Shuriah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam organisasi.

Menempatkan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* secara tepat dan selaras dengan kebutuhan Nahdlatul Ulama akan dapat memperkokoh wibawa dan otoritas ulama sebagai panutan dan pemegang kendali organisasi. Dengan demikian citra Nahdlatul Ulama sebagai organisasi para Ulama akan semakin dapat dirasakan oleh ummat.

C. Analisis terhadap implementasi sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang diterapkan pada pemilihan Rais 'Aam dalam Mukhtamar ke 33 Nahdlatul Ulama

Secara keseluruhan, implementasi sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang diterapkan pada pemilihan Rais 'Aam dalam Mukhtamar ke 33 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang Jawa Timur mengacu kepada rumusan konsep yang telah difinalisasi dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama ke 3 pada tanggal 14-15 Juni 2015 di Jakarta. Rumusan konsep tersebut juga dijadikan materi persidangan pada Mukhtamar ke 33 Nahdlatul Ulama baik dalam materi rancangan tata tertib Mukhtamar maupun materi bahasan dalam komisi Organisasi.

Berdasarkan dokumen dan fakta yang terjadi, sesuai dengan pengamatan peneliti dapat dijelaskan bahwa implementasi sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang diterapkan pada pemilihan Rais 'Aam dalam Mukhtamar ke 33 Nahdlatul Ulama melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui kepanitiaan nasional Mukhtamar ke 33 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang mengirimkan

surat undangan Mukhtamar sekaligus permintaan usulan nama-nama yang dicalonkan sebagai *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* kepada seluruh Pengurus Cabang dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama se Indonesia serta Pengurus Cabang Istimewa yang berada di luar Indonesia satu bulan sebelum pelaksanaan Mukhtamar.

2. Panitia Nasional Mukhtamar ke 33 Nahdlatul Ulama menerima pendaftaran peserta Mukhtamar dengan meminta mandat dari masing-masing Pengurus Cabang dan Wilayah yang juga disertai usulan nama-nama calon *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*, walaupun sebagaimana delegasi tidak menyertakan usulan nama-nama calon *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dengan berbagai argumentasinya sendiri.
3. Terjadi perdebatan sengit pada saat pembahasan rancangan tata tertib Mukhtamar ke 33 Nahdlatul Ulama yang terkait dengan sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*, sehingga diputuskan melalui musyawarah khusus para Rais Shuriah se Indonesia dan menghasilkan keputusan tetap menggunakan sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dalam memilih Rais Aam.
4. Berdasarkan keputusan musyawarah khusus Rais Shuriah tersebut, maka seluruh Pengurus Cabang dan Pengurus Wilayah mengusulkan calon anggota *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* sebanyak banyaknya sembilan orang secara resmi yang ditandatangani oleh Rais Shuriah dan Katib Shuriah dengan distempel basah oleh masing-masing pengusul sesuai dengan tingkatannya.

5. Sembilan nama usulan calon anggota *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* diserahkan kepada panitia Mukhtar ke 33 Nahdlatul Ulama dalam amplop tertutup dan langsung dimasukkan kedalam kotak yang telah disediakan.
6. Panitia Mukhtar melakukan tabulasi dengan menghitung usulan nama-nama calon anggota *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dalam sidang tersebut secara terbuka dan transparan.
7. Berdasarkan tabulasi dan perhitungan yang dilakukan oleh Panitia Mukhtar ke 33 Nahdlatul Ulama atas usulan calon anggota *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* tersebut Prof. Akh. Muzakki, Grad. Dip, SEA, M. Ag, M. Phil, P.hD selaku pimpinan sidang pemilihan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* membacakan nama-nama yang terpilih sebagai berikut :
 - a. KH. Makruf Amin memperoleh 333 suara
 - b. KH. Nawawi Abdul Jalil memperoleh 302 suara
 - c. KH. T.G. Turmudzi Badruddin memperoleh 298 suara
 - d. KH. Kholilurrahman memperoleh 273 suara
 - e. KH. Dimiyati Rais memperoleh 236 suara
 - f. KH. Syeikh Ali Akbar Marbun memperoleh 186 suara
 - g. KH. Maktum Khannan memperoleh 162 suara
 - h. KH. Maimun Zubair memperoleh 156 suara
 - i. KH. Mas Ahmad Subadar memperoleh 135 suara

dia menyatakan tidak bersedia mengemban amanah sebagai Rais 'Aam demi menjaga soliditas dan kemaslahatan Nahdlatul Ulama. Hal ini dilakukan setelah mempertimbangkan dan mengamati dinamika politik internal yang terjadi selama perhelatan Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama dan memasrahkan kepada *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* untuk memilih Rais 'Aam yang dipandang telah mencapai shahibul maqam.

Setelah melalui proses mujahadah, istikharah dan istisyrarah, maka *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* mengamanahkan posisi Rais 'Aam kepada KH. Makruf Amin yang sebelumnya memang telah ditunjuk sebagai wakil Rais 'Aam sekaligus menempati posisi pertama didalam perolehan suara dalam pengusulan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*.

Sikap bijaksana, santun dan berwawasan luas yang telah ditunjukkan oleh *Ahlil Halli Wal 'Aqdi* serta Rais 'Aam yang ditunjuk selaras dengan prinsip-prinsip kemasyarakatan dalam Nahdlatul Ulama yang terimplementasikan dalam sikap :

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan budaya yang mengandung nilai-nilai kebaikan, kesantunan, keramah tamahan serta keadaban.
- b. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi maupun golongan.
- c. Menjunjung tinggi sifat keikhlasan dalam berkhidmah serta berjuang.
- d. Menjunjung tinggi persaudaraan (*ukhuwah*), persatuan (*ittihad*), serta saling kasih mengasihi antar sesama.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mencermati, memahami, mengkaji dan menganalisa dokumen, fakta dan peristiwa yang terjadi dalam Mukhtar ke 33 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang Jawa Timur yang menggunakan sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* untuk memilih Rais 'Aam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang diberlakukannya sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* pada pemilihan Rais 'Aam dalam Mukhtar ke 33 Nahdlatul Ulama didasarkan atas keprihatinan terhadap infiltrasi politik kepentingan yang menggunakan berbagai cara negatif untuk mencapai tujuannya. Hal ini merupakan pengamalan dan pengejawantahan prinsip *Maslahah* dan *Sadd al- Dhari'ah* yang tujuannya adalah untuk menghindarkan perselisihan dan perpecahan serta meminimalisir adanya praktek pemilihan pemimpin yang menyimpang dari nilai-nilai agama dan hukum serta Akhlaqul Karimah yang dipegang teguh Oleh Nahdlatul Ulama.

Dengan demikian faktor yang melatar belakangi diberlakukannya sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* pada pemilihan Rais 'Aam dalam Mukhtar ke 33 Nahdlatul Ulama sebagaimana yang telah terdeskripsikan diatas dapat menjadi dasar argumen dalam mereformulasikan rumusan *Manhaj al-*

Studi Kasus Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama“ ini menghasilkan temuan bahwa, teori *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dalam kajian fiqh siyasah telah mengalami pergeseran paradigma yang sangat signifikan yaitu dari sistem yang dipergunakan untuk memilih kepemimpinan formal kenegaraan bergeser ke ranah sistem pemilihan pemimpin nonformal kemasyarakatan.

Sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* menurut al-Mawardi adalah merupakan salah satu cara untuk mengangkat seorang khalifah atau pemimpin negara yang dilakukan oleh sekelompok orang yang diberikan amanah dan dipercaya oleh ummat karena kualitas dan kapasitas pribadi dan sosial mereka yang sudah diakui dan teruji secara luas. Akan tetapi dalam terminologi yang sama Nahdlatul Ulama menggunakan sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* untuk memilih Rais Aam dalam pelaksanaan Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama di kabupaten Jombang Jawa Timur.

Dalam kajian fiqh siyasah, tidak ditemukan konsep atau metode yang *Sharikh* tentang tatacara dan prosedur yang terkait dengan pemilihan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*, apakah melalui proses penjaringan aspirasi atau usulan dari masyarakat melalui musyawarah, ataukah melalui penunjukan dari penguasa, atau melalui proses pemungutan suara atau voting yang dilakukan oleh masyarakat atau perwakilan masyarakat.

Akan tetapi ada ulama yang berpendapat bahwa pembentukan lembaga *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* pertama kali dilakukan oleh pemerintahan bani Umayyah periode ke dua di Cordova pada masa kekuasaan Khalifah al-Hakam II pada tahun 961-976 M yang membentuk *majelis al-syura* yang

beranggotakan pembesar-pembesar Negara dan pemuka masyarakat. Kedudukan *majelis al-syura* ini setingkat dengan pemerintah dan khalifah sendiri yang menjadi ketua lembaga tersebut, tugasnya adalah melakukan musyawarah dalam masalah-masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintahan negara.

Konsep pembentukan dan pemilihan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang telah dikenal dalam fiqh siyasah tersebut cenderung berbeda dengan konsep pembentukan dan pemilihan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dalam pelaksanaan Mukhtamar ke 33 di Kabupaten Jombang, dimana masing-masing Pengurus Cabang dan Wilayah Nahdlatul Ulama se Indonesia mengusulkan maksimal sembilan orang yang akan ditetapkan sebagai *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang penetapannya didasarkan atas perolehan suara terbanyak sesuai dengan usulan yang masuk.

Dengan demikian, rumusan konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang diberlakukan sebagai sistem pemilihan Rais 'Aam dalam Mukhtamar ke 33 Nahdlatul Ulama merupakan sistem yang melampaui demokrasi, dalam pengertian konsep musyawarah mufakat yang didasarkan atas usulan dari bawah untuk memilih para ulama yang memiliki kriteria khusus dengan kualitas keulamaan yang diakui untuk menjadi *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* adalah merupakan bentuk demokrasi yang unik, yang tidak hanya berdimensi horizontal akan tetapi lebih dominan berdimensi vertikal ilahiyah sehingga sistem dapat juga disebut dengan istilah *teo demokrasi* atau demokrasi yang didasarkan atas prinsip dan petunjuk Allah SWT. Rumusan ini oleh peneliti

seperti legal standing dan keabsahan pemberlakuan sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dalam pelaksanaan Mukhtamar ke 33 di kabupaten Jombang, sistem perhitungan dan tabulasi penentuan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*, nilai yuridis dan legitimasi musyawarah khusus Rais Syuriah dalam penentuan pemberlakuan sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dalam Mukhtamar ke 33 Nahdlatul Ulama dan berbagai dinamika yang terjadi dalam perhelatan Mukhtamar tersebut yang dalam penelitian ini tidak dibahas karena keterbatasan peneliti.

D. Saran dan Rekomendasi

Sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang diberlakukan dalam perhelatan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke 33 di Kabupaten Jombang merupakan sistem yang sangat efektif dalam meminimalisir terjadinya politik transaksional serta potensi timbulnya konflik antar pendukung kandidat yang berhadapan dalam perebutan pimpinan organisasi. Akan tetapi aspek yang masih dirasa perlu disempurnakan adalah penerapan sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* ini hendaknya tidak hanya diperuntukkan untuk pemilihan Rais 'Aam atau Rais untuk tingkat Pengurus Wilayah dan Cabang saja, akan tetapi juga diberlakukan untuk memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Ketua Tanfidhiyah pada level Pengurus Wilayah dan Cabang hingga pada tingkat pengurus Majelis Wakil Cabang dan Ranting Nahdlatul Ulama. Dengan demikian potensi terjadinya politik transaksional maupun benturan antar pendukung kandidat untuk memperebutkan posisi Ketua Umum Tanfidhiyah dapat dihindari atau paling tidak diminimalisir.

Keberadaan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang diusulkan oleh Pengurus Cabang dan Wilayah Nahdlatul Ulama se Indonesia serta telah ditetapkan berdasarkan suara terbanyak berdasarkan rangking yang dilakukan melalui proses tabulasi usulan suara yang masuk, berdasarkan kualifikasi yang telah ditentukan merupakan potensi yang sangat luar biasa. Hal ini disebabkan oleh kualitas personal yang melekat pada anggota *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* telah diakui oleh ummat serta telah mendapatkan legitimasi berdasarkan usulan dari ummat khususnya Pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkat Wilayah dan Cabang yang tentunya setelah mendapatkan masukan dari pengurus pada level dibawahnya. Dengan demikian sangat disayangkan apabila keberadaan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* tersebut hanya memiliki kewenangan untuk memilih Rais 'Aam saja, setelah itu tidak difungsikan lagi dalam bentuk fungsi lain dapat lebih menguatkan supremasi Ulama dalam Nahdlatul Ulama.

Menurut hemat peneliti, potensi *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang terdiri dari ulama pilihan serta mendapatkan legitimasi yang kuat berdasarkan usulan dari bawah merupakan modal kuat untuk dapat memperkuat keberadaan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi para Ulama. Akan lebih baik dan bermanfaat apabila *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* tersebut di wadah dalam konstruksi struktur baru dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama dengan fungsi dan kewenangan yang diselaraskan dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan organisasi. Apabila belum memungkinkan terakomodasi dalam struktur baru, maka *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dapat juga disatukan atau dilebur dalam dewan Mustasyar dengan fungsi dan kewenangan yang diperkuat dan diperluas yang

tentunya diselaraskan dengan kebutuhan organisasi untuk kemaslahatan serta penguatan organisasi.

Ahlul Halli Wal 'Aqdi yang diberlakukan sebagai sistem dalam memilih pemimpin sangat relevan untuk dipergunakan dalam memilih dan mengangkat seorang pemimpin baik dalam lingkup formal kenegaraan atau non formal kemasyarakatan. Dengan demikian sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* ini dapat dijadikan solusi untuk memilih pemimpin ideal yang sesuai dengan harapan ummat yang dipimpinnya. Untuk itu diperlukan kajian lebih lanjut perihal sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* ini agar lebih komprehensif dan sempurna hingga menghasikan berbagai inovasi dan kreasi baru yang selaras dengan perkembangan dan kebutuhan zaman yang bertujuan untuk pengembangan dan materi dalam kajian fiqh siyasah.

- Carl Brokkmann, *History of The Islamic Peoples*. London : Routledge&Kegan Paul,1982.
- Djazuli, HA. *Fiqh Siyasaah ; Implementasi kemaslahatan ummat dalam rambu-rambu syari'ah*. Jakarta : Prenada Media Group : 2003.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV. Jakarta : Ictiar Baru Van Hoevo, 1995 .
- Fealy, Greg, *Ijtihad Politik Ulama' ; Sejarah NU 1952-1967* . Yogyakarta : LKiS dan TAF, 2003.
- Fajrul, Falakh,M, *Pelajaran dari Kemelut NU*, dalam buku Geger di Republik NU; Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsir Makna. Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, 1999.
- Ghazali (al),Abu Hamid Muhammad,*Al-Mustasfā min Ilm al-Ushāl*,Vol 1.Beirut, Dar el-Fikr, 1997
- Ghazali, (al), *Tadbir al-Masbuq fi Nasihat al Mulk*. Cairo: Dar al-Maktabah,1327 H.
- Geertz, Cliffort, *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.
- Ghazali Said, Imam, *Catatan Penyunting : Dokumentasi dan Dinamika Pemikiran Ulama Bermadzhab dalam Ahkam al-Fiqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-199 M)* . Surabaya : PT. Diantama, 2004.
- Hamim, Toha, *Islam dan NU dibawah tekanan problematika kontemporer*.Surabaya : Diantama : 2004.
- Husayn al-Baihaqi, Ahmad, ed, Muhammad Abd al-Qadir 'Atha, *SunanKubra*, Makkah : Maktabah Dar al-Baz, 1994.
- Haidar, Ali, *Nahdlatul Ulama' dan Islam di Indonesia ; Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta ; PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Hallaq, Wael Bahjat, *A History of Islamic Legal Theories*. Cambridge:University Press, 1997.
- Hammus, Ma'mun, *As-Siyâsah asy-Syar'iyah 'alâ Minhâj al-Wahyayn al-Kitâb wa as-Sunnah ash-Shahîhah*. Damaskus, Suriah, Wizarah al-'lam cet. I, 2005 M.

- Hazm, Ibn, *Al-Fashl fî al-Milal wa al-Ahwâ' wa an-Nihal*. Beirut ; Dar al-Turats ,tt.
- Hashim Ash'ari, Muhammad, *Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Jombang: Maktabah al-Turats, 1418 H .
- Hisham,Ibn, *As Shirah An-Nabawiyyah*, Tahqiq Muhammad Fahmi As-Sarjani . Kairo : Maktabah Taufiqiyyah, tt.
- Harari(al),Abdullah, *Izhhar al-'aqidah al-Sunniyah bi Syarh al- 'aqidah al-Thahawiyah*. Beirut: Dar al-Masyari', 1997 .
- Hakim, Abrurrahman, *Mabahits al-Illah fi al-Qiyas inda al-Ushuliyyin*. Beirut: Dar al-Basyr al-Islamiyyah, 1986.
- Hasan (al),Asy'ari,Abu, *al-Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Mushallin*, Jilid. I . Kairo : Maktabah al-Nahdlah, 1950.
- Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*,. Jakarta: P3M, 1987
- Hanbal, Ahmad, Ibn, *Al-Musnad*, edisi Ahmad Muhammad Syakir . Cairo : Dar al-salam 1984 .
- Hitti, Philip,K, *History of The Arabs*. New York : Palgrave Macmillan, 2002
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi doktrin politik Islam*, .Jakarta : Gaya Media Pratama : 2001.
- _____, *The Reconstruction of Religious Thaough in Islam*.Lahore : Sheikh Muhammad Asraf, 1953.
- Khathib (al) asy-Syarbini, *Mughnî al-Muhtâj*. Beirut : Dar el Fikr al-Mu'ashir, 1980.
- Karim Zaidan,Abdul, *al-Wajiz fî Ushul al-Fiqh*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1987.
- Latief, Hasyim, *NU Penegak Panji Ahlusunnah wal Jamaah*. Surabaya : PWNJ Jawa Timur, 1979 .
- Mawardi (al),Abu Hasan, *al-Ahkam al-Shulthaniyyah' Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam Syari'at Islam* (tej. Fadli Bahri). Jakarta Darul Falah, 2006.
- _____, *al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilayāh al-Diniyyāh* .Mesir : Musthafa al-Arabi al-Halabi: tt.
- Maududi (al), Abu A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam* (terj) Asep Hikmat. Bandung : Mizan, 1995.

- Misrawi, Zuhairi, *Fikih Civil Society Versus Fikih Kekuasaan : Sebuah tawaran pembaharuan politik Islam*, dalam buku *Islam, Negara dan Civil Society; gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta : Paramadina, 2005.
- Mubarakfuri (al), Shofiyurrahman *Arrāhiq al-makhtūm, Bahsun fī al-Sirāh An-Nabawiyah alā Shāhibihā Afdhal al-Shalāh Wa al-Salām*. Riyadh : Dar al-Salam, 1414 H.
- Muslim (al), Abu Hasan, bin Hajjaj, *Shaheh Muslim* . Beirut : Dar al-Fikr, 1984.
- Majid, Nurcholis, dalam buku Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara ; Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta UI Press, 1993.
- Montgomery Watt, W, *Kejayaan Islam : Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis* . Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- Murtopo, Ali, *Strategi Politik Nasional*. Jakarta : CSIS, 1974.
- Nusrati, Ali Asgar, *Nizame e-Siyāsi Islām* . Qom : Entesharat-e Imam Asr , 2003 M.
- Naraqī, Ahmad Mulla, *Awaid Al-Ayyam* . Qum : Maktabah Bashirati , 1903.
- Rahman, Fazlur, *State, Politics and Islam*, (ed) Mumataz Ahmad. Indiana Polis : American Trust Publications, 1986.
- Rober Gleave, *Inevitable Doubl; Two Theories Ismalic Jurisprudence*. Leiden : The Netherlands ; BRILL, 2000.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rasyid Ridha, Muhammad, *Tafsir al-Mannār*, Jilid V. Cairo : maktabah al-qahirah, 1960 .
- Rajab, Ibn, al-Hanbali, *Kasyf al-Kurbah fī washf Ahl al-Ghurbah*. Kairo: Dar al-Maktabah, 1988 .
- Syarief Romas, Chumaidi, *Kekerasan di Kerajaan Surgawi*. Yogyakarta, PT. Kreasi Wacana, 2003.
- Ahmad Siddiq, *Khittah Nahdliyyah*. Surabaya ,LTN-NU JATIM : 2005.
- Syafi'ie (al), Muhammad Ibn Idries, *al – Umm*, Jilid IV. Kairo : Dar al-Syabab, tt .

- Syatibi (al), Abu Ishaq, *al-Muawafat fi Ushul al-Syari'ah*, Vol 2, ed, Abu Ubaydah. Dar al-Affan li al-Nashr wa al tawzi' 1007.
- Suaedy, Ahmad dan Sulisty, Hermawan, *Kyai dan Demokrasi; Sebuah potret pandangan tentang pluralisme, toleransi, persamaan, negara, pemilu dan partai politik*. Jakarta : P3M dan TAF : 2000.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tatanegara ; Ajaran, sejarah dan Pemikiran*. Jakarta : UI Press : 1993.
- Sumaryono,E, *Hermoneutika; Sebuah metode Filsafat*. Jogyakarta ; Kanisius: 1995.
- Salam Madzkur, Muhammad, *al-Ijtihad fi Tasyri' al-Islamiy*. Dar an-Nahdlah al-Arabiyyah: 1994.
- Syarbini (al), Khathib, *Mughnî al-Muhtâj*. Beirut ; Dar el Fikr al-Mu'ashir, 1980.
- Suprayogo,Imam, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*.Bandung, PT. Remaja Rosdakarya: 2001.
- Sumaryono,E, *Hermoneutika; Sebuah metode Filsafat* . Jogyakarta : Kanisius, 1995.
- Soejono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*.Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974.
- Shodiq, Ahmad, *Dinamika Kepemimpinan NU ; Refleksi Perjalanan KH. hasyim Muzadi*.Surabaya : LTN-NU Jatim , 2004
- Siddiq, Ahmad, *Khittah Nahdliyyah*. Surabaya: Khalista dan LTN-NU Jawa Timur , 2005)
- Shahawi (al), Shalah, *al-wājiz fi Fiqh al-Imāmah al-Udmā*. Beirut : Dar al-Hijrah li Thiba'ah wa al-Nasyr, tt .
- Sirjani (al), Raghīb, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia* (terj) Sonif, dkk . Jakarta : Al-Kautsar, 2009.
- Sirjani (al), Raghīb, *Madzā Qoddama al-Muslimūna lil alam Ishāmatu al-Muslimīn fi al-Hadharāh al-Insāniyyāh*. Cairo : Mu'assah Iqra, 2009.
- Syahrastani (al), Muhammad bin Abd al-Karim, *Al-Milāl wa al-Nihāl*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Syaukani (al), *Irsyad al- Fuhul*, Bairut: Dar al-Fikr, 1403 H.

- Syarbini (al) Khatib, *Mughnî al-Muhtâj*. Beirut : Dar el Fikr al-Mu'ashir, 1980.
- Taimiyah, Ibn, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Riyadh : Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t.tp
- Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawra, *Sunan at-Tirmidzi*, edisi Ahmad Muhammad Syakir. Cairo : Dar al-Salam, 1954 M / 1367 H.
- Ibnu Taimiyah, Ibn, *As-Shiyāsah as-Syar'iyyah fî Islāh al-Ra'iy wa al-Raiyyāh* . Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, t.tp.
- Thabari (al), Ibn Jarir, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*. Cairo: Al-Mathba'ah al-Husainiyah, 1334 H.
- _____, *Tarikh al-Rasul wa al-Mulk*, Juz III, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1969
- Qal'ah Jie, Rawwas, *Al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, Beirut: Dar an-Nafais, cet. I, 2000 M.
- Qalqasyandi (al), *Ma'âtsir al-Inâfah fî Ma'âlim al-Khilâfah*, Cairo : Musthafa al bab al-halabi, 1392 H.
- Qasimi, (al), Zafir, *Nidzām al-Hukmi fî al-syarī'ah wa al tārīkh*. Beirut : Dar al-Nafais, 1974 .
- Qahir bin Thahir, Abu Manshur, *al-Milal wa al-Nihal*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1970.
- Qayyim(al) Jauziyyah, Ibn, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, vol. 3 . Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- Qamaruddin Khan, *The Political Thought of Ibn Taimiyah*, Terj. Anas Mahyuddin *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*. Bandung : Pustaka, 1983.
- Van Bruinessen, Martin, *Tradisionalists Muslims in A Modernizing World ; The Nahdlatul Ulama and Indonesia's New Order Politics, Fictional Conflict, and The Search for a New Discourse* dan diterjemahkan oleh farid Wajidi berjudul NU ; Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana baru, (Yogyakarta; LKiS ; 1994)
- Weiss, G, (ed), *Studies in Islamic Legal Theoty*, Leiden, The Natherlands: BRILL, 2002.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Wawancara dan Statement KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah yang merupakan ketua Tanfidhiyah Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Jawa Timur pada saat memberikan sambutan pada acara buka bersama dengan Gubernur dan PCNU se Jawa Timur yang dilaksanakan di Kantor PWNU Jawa Timur pada tanggal 12 Juli 2015

Wawancara peneliti dengan KH. Syafruddin Syarief yang merupakan Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur pada tanggal 17 Nopember 2015 di Kantor PWNU Jawa Timur

Wawancara peneliti dengan KH. Syafruddin Syarief di Kantor PWNU Jawa Timur sewaktu selesai buka bersama pada tanggal 8 Juli 2015

Wawancara dengan KH. Abu Hapsin, P.hD selaku ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah sebagaimana yang dimuat dalam Majalah AULA edisi ISHDAR 03 SNH XXXVII Maret 2015

Wawancara dengan KH. Masdar Farid Mas'udi selaku Rais Syuriah PBNU serta ketua Tim Penyusun Konsep *Ahlul Halli Wal Aqdi* sebagaimana yang dimuat dalam Majalah AULA edisi ISHDAR 03 SNH XXXVII Maret 2015